

9-5-2017 / 7



Kapus Panwas LU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **Den 003763**
 CODE :
 DITERIMA TGL : **02-05-2017**
 PUKUL :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **167.7/PAN.MK/4/2017**
 Hal : **Panggilan Sidang**

27 April 2017

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
 Jakarta 10270

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

- hari : **Selasa**
- tanggal : **9 Mei 2017**
- waktu : **Pukul 11.00 WIB**
- tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
- acara : **Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera,
Kasianur Sidaunik
 NIP. 19570122 198303 1 001

- Tembusan:
- Yth. Ketua Komisi III DPR-RI